

***THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, THE GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THE COMPETENCE OF HUMAN RESOURCES OF QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS WITH ORGANIZATIONAL COMMITMENTS AS MODERATING VARIABLE IN TANJUNG JABUNG BARAT***

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Oleh:

**Ferri Saputra T<sup>1)</sup>, Sri Rahayu<sup>2)</sup>, Yudi<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2020

<sup>2&3)</sup> Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Email: [ferrysaputra960@gmail.com](mailto:ferrysaputra960@gmail.com)<sup>1)</sup>, [srijambi@gmail.com](mailto:srijambi@gmail.com)<sup>2)</sup>, [yudi.telanai@gmail.com](mailto:yudi.telanai@gmail.com)<sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this research is the effect of the implementation of government accounting standards, the government internal control systems and the competence of human resources of quality of financial statements with organizational commitment as a moderating variable in Tanjung Jabung Barat Regency. The sample in this study were the Head of the OPD, the Treasurer of the OPD and the OPD Financial Administration Officer (PPK) in the Tanjung Jabung Barat government environment, amounting to 93 respondents. The data in this study are primary data. Hypothesis was tested by using multiple regression analysis and MRA with an SPSS Software program. The results showed The Implementation of government accounting standards, effectiveness of the government internal control systems and the competence of human resources have an influence simultaneously and partially on the quality of financial statements. Organizational commitment as a moderating variable successfully moderated the correlation of the implementation of government accounting standards, and effectiveness of the government internal control systems on the quality of financial statements while organizational commitment failed to moderate the correlation of the competence of human resources and the quality of financial statements.*

*Keywords: The Implementation Of Government Accounting Standards, Effectiveness Of The Government Internal Control Systems, the Competence Of Human Resources, Quality of Financial Statements, Organizational Commitment*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sampel dalam penelitian yaitu Kepala OPD, Bendahara OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berjumlah 93 responden. Data dalam penelitian adalah data primer. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dan MRA dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi sebagai variabel moderasi berhasil memoderasi hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan komitmen organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

**KataKunci:** Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Laporan Keuangan, Komitmen Organisasi

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan direvisi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir di revisi dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah dan otonomi daerah dan Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 yang juga telah direvisi dengan Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah mengatur bahwa dalam menjalankan pembangunannya pemerintah pusat memberikan keleluasan atau kewenangan kepada daerah untuk pengelolaan daerahnya sendiri sebagai contoh dalam pengelolaan keuangan, sumber daya yang ada di dalamnya dan memanfaatkan potensi daerahnya, dari munculnya undang – undang ini munculah langkah dalam penerapan reformasi dibidang keuangan sebagaimana yang terkandung dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai keuangan daerah dan pembedaharaan Negara.

Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2015 masih banyak Kabupaten Kota yang belum mendapatkan opini WTP, baru beberapa kabupaten kota yang mendapatkan opini WTP antara lain Kabupaten Batanghari, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Sarolangun mendapatkan opini WDP dari BPK Provinsi Jambi. BPK Provinsi Jambi tidak memberikan Pendapat (TMP) kepada Kota Jambi dan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2015.([www.jambi.bpk.go.id](http://www.jambi.bpk.go.id))

Peningkatan terjadi pada 2016 kabupaten kota di Provinsi Jambi banyak yang mendaptkan opini WTP yaitu 8 Kabupaten Kota antara lain Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Sarolangun. Ada 2 kabupaten yang mendapatkan opini WDP yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Bungo. Sedangkan kabupaten Tanjung Jabung Barat masih mendapatkan predikat Tanpa Memberikan Pendapat (TMP) dari BPK Provinsi Jambi. ([www.Jambi.bpk.go.id](http://www.Jambi.bpk.go.id))

Di tahun 2017 sudah 9 Kabupaten kota yang mendapatkan Opini WTP dari BPK Provinsi Jambi kecuali Kabupaten Bungo yang masih mendapatkan opini WDP dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengalami peningkatan dari TMP menjadi WDP. Di tahun 2018 seluruh Kabupaten Kota Provinsi Jambi mendapatkan opini WTP dari BPK Provinsi Jambi.

Permasalahan ketidakpatuhan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2017 antara lain kekurangan volume pekerjaan/barang senilai Rp. 547,96 miliar yang

terjadi pada 475 pemda. Selain itu ditemukan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada 395 pemda senilai Rp. 344,45 miliar, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pada 262 pemda senilai Rp. 148,04 miliar, biaya perjalanan dinas ganda atau tidak sesuai ketentuan senilai Rp. 87,45 miliar pada 232 pemda, serta penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp. 20,72 miliar terjadi pada 54 pemda. Pada tahun 2016 laporan hasil dari pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, BPK Provinsi Jambi Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini tak lepas banyak temuan dari BPK, ada tiga temuan yang fatal menurut BPK pada tahun 2015 diantaranya beberapa temuan dalam pelaporan keuangan BUMD Jabung Barat Sakti selama beberapa tahun terakhir tidak pernah di audit oleh akuntan publik, pencatatan dan perhitungan aset tidak wajar dan tidak di dukung bukti – bukti sehingga tidak didapat nilai penyusutan barang milik daerah, dan masih rendahnya sistem pengendalian internal (SPI) Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Serta masih banyak temuan BPK tahun tahun sebelumnya yang belum ditidklajuti oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini Inspektorat dan OPD terkait.

Beberapa temuan besar lainnya dari BPK pada APBD 2015 diantaranya di Dinas Kelautan dan Perikanan, Kecamatan Sebrang Kota, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) serta megaproyek pembangunan Waterfront City (WFC) oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tanjung Jabung Barat dengan nilai temuan Rp. 31 Miliar lebih. Dampak dari temuan sebanyak ini yang membuat pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *Disclaimer*.([www.tanjabbarkab.go.id](http://www.tanjabbarkab.go.id), 2016)

Pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jambi, pemberian opini ini setelah tak lepas dari tindak lanjut dari laporan keuangan tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Tim Bidang Akuntansi BPKAD Tanjung Jabung Barat. Yang masih jadi pengecualian yaitu pada laporan aset yang belum diketahui keberadaannya([www.tanjabbarkab.go.id](http://www.tanjabbarkab.go.id), 2018)

Pada tahun anggaran 2018 Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya setelah 2 tahun mendapatkan predikat *Disclaimer* dan tahun sebelumnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan opini ini menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi tidak lepas dari tidaklanjut dari temuan – temuan tahun sebelumnya serta pembenahan aset yang tidak diketahui keberadaannya yang selama ini selalu jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, standar ini lah yang dijadikan acuan wajib bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyajikan dan menyusun laporan keuangan karena standar akuntansi pemerintah dijadikan salah satu kriteria Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk memberikan opini kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Fenomena yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Tanjung Jabung Barat yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) masih belum sepenuhnya berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh staf lain, yang mengakibatkan belum sepenuhnya PPK-OPD mampu menyusun laporan keuangan dengan baik dan tepat waktu yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah tahun anggaran berakhir. Begitu juga dengan pegawai yang bekerja di bidang pengelolaan keuangan, masih banyak yang belum memahami sepenuhnya akan tugas dan tanggungjawabnya, sistem akuntansi dan peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Untuk itu sangat diperlukan adanya komitmen dari PPK-OPD dan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan laporan keuangan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan SAP dan peraturan terkait.

Pada penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Harleni, 2016) yang berjudul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi pada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang membedakan dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah ditambahnya Variabel Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi dan objek penelitian yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan menambahkan variabel moderasi tidak lepas dari saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya untuk menambahkan variabel lainnya dalam penelitian selanjutnya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
2. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
3. Apakah Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
5. Apakah Komitmen Organisasi Memoderasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
6. Apakah Komitmen Organisasi Memoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat?
7. Apakah Komitmen Organisasi Memoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan adanya pengaruh signifikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Untuk membuktikan adanya pengaruh signifikan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Untuk membuktikan adanya pengaruh signifikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Untuk membuktikan adanya pengaruh signifikan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Untuk membuktikan pengaruh signifikan Komitmen Organisasi dalam memoderasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Untuk membuktikan pengaruh signifikan Komitmen Organisasi dalam memoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Untuk membuktikan pengaruh signifikan Komitmen Organisasi dalam memoderasi Kompetensi Sumber Daya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

### 2.1. Laporan Keuangan

Laporan keuangan dibuat untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan atau selama 1 tahun anggaran. Beberapa pengertian laporan keuangan menurut beberapa ahli, (Harahap, 2015) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan media paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

### 2.2. Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah, diharapkan berisikan informasi yang transparan, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dibutuhkan langkah-langkah strategis yang perlu segera diupayakan dan diwujudkan bersama dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 tahun 2010 yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi menurut (Mardiasmo, 2009) diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan. Sedangkan menurut (Bastian, 2011) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia

### 2.3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dalam PP No. 60 Tahun 2008 adalah sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut (Bastian, 2010) sistem pengendalian intern

yaitu suatu proses yang dijalankan kepala daerah atau instansi yang diperuntukan untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan efektifitas dan efisiensi operasi.

### 2.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003 mengatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Menurut (Wibowo, 2007) kompetensi yaitu suatu kemampuan untuk melakukan atau melaksanakan tugas dengan keterampilan dan pengetahuan serta sikap kerja yang dituntut dalam tugas tersebut. Dengan kata lain kompetensi menunjukkan suatu keterampilan atau pengetahuan yang yang dicerminkan dengan sikap profesionalisme dalam bidang tertentu suatu hal yang penting.

### 2.5. Komitmen Organisasi

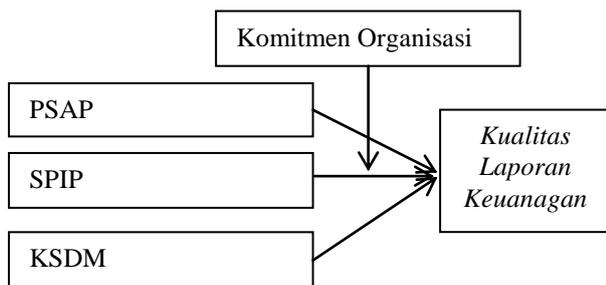
Menurut (Sopiah, 2008) komitmen organisasi dapat disimpulkan sebagai suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya:

- Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi.
- Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan
- Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi.

Pada intinya makna dari komitmen organisasi diatas mempunyai penekanan pada proses individu (pegawai) dalam mengidentifikasi dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan, dan tujuan organisasi. Arti lainnya komitmen organisasi mempunyai pengertian sebagai sesuatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif terhadap organisasi, dengan kata lain komitmen organisasi menyiratkan hubungan individu dengan perusahaan atau organisasi secara aktif. Karena individu yang menunjukkan komitmen tinggi memiliki keinginan untuk memberikan tenaga dan tanggung jawab yang lebih dalam menyongkong kesejahteraan dan keberhasilan organisasi tempatnya bekerja.

### 2.6. Model Penelitian

Model penelitian mengenai hubungan antar variabel-variabel dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: diolah penulis

**Gambar 1. Model Penelitian**

## 2.7. Hipotesis

- H1: Diduga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- H2: Diduga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- H3: Diduga Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- H4: Diduga Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- H5: Diduga Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Standar Akuntansi pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- H6: Diduga Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
- H7: Diduga Komitmen Organisasi memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, (Sekaran, 2006) data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti pada variabel minat untuk tujuan khusus penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari responden. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner dan wawancara terkait variabel penelitian.

Disamping data primer peneliti juga menggunakan data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan telaah dokumentasi yang terkait dengan teori-teori dan literatur yang berkaitan dengan variabel penelitian.

### 3.2. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan kuesioner, Menurut (Sekaran, 2006),

Kuesioner (questionnaires) adalah daftar pertanyaan tertulis yang dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab oleh responden. Menggunakan alternatif jawaban yang sama untuk berbagai macam pertanyaan membuat responden dapat memberikan jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan dalam waktu yang relatif singkat. Penyebaran kuesioner ini merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien, karena kuesioner dapat dibagikan langsung, disuratkan, ataupun disebarkan melalui email kepada responden. Dalam penelitian ini yang akan diberikan kuesioner adalah responden yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan diunit kerjanya dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

### 3.3. Populasi dan Sampel

Adapun responden yang diberikan kuesioner adalah Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran, Bendahara OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) OPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berjumlah 93 (Sembilan Puluh Tiga).

### 3.4. Model dan Teknik Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regresi linier berganda (*Multiple Linear Regression Analysis*). Menurut (Junaidi, 2015) analisis regresi berganda adalah regresi sederhana dengan tambahan asumsi lain, yaitu asumsi tidak ada multikolinieritas yang berarti tidak terdapat hubungan linear yang pasti antar peubah bebas. Untuk keabsahan hasil analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji kualitas instrumen pengamatan, uji normalitas data dan uji asumsi klasik. Pengolahan data menggunakan software SPSS.

Model analisis regresi linier berganda untuk menguji tingkat signifikan variabel dependent terhadap variabel independent, dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

a = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$  = Koefisien regresi Variabel Bebas

X<sub>1</sub> = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X<sub>2</sub> = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

X<sub>3</sub> = Kompetensi Sumber Daya Manusia

$\varepsilon$  = Error term

Pada hipotesis kelima sampai ketujuh menggunakan variabel moderating untuk mengetahui apakah komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ada 3 cara menguji regresi dengan variabel moderating yaitu 1) Uji Interaksi, 2) Uji Selisih Mutlak dan 3) Uji Residual. Pada penelitian ini menggunakan

uji interaksi atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang merupakan aplikasi khusus regresi berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (Ghozali, 2013) Adapun; *Moderated Regression Analysis* (MRA) dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y_1 = a + \beta_1 X_1 + \beta_4 X_4 + \beta_5 (X_1 \cdot X_4) + \varepsilon$$

$$Y_2 = a + \beta_2 X_2 + \beta_4 X_4 + \beta_6 (X_2 \cdot X_4) + \varepsilon$$

$$Y_3 = a + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_7 (X_3 \cdot X_4) + \varepsilon$$

*Keterangan:*

- Y = Kualitas Laporan Keuangan
- a = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_7$  = Koefisien regresi
- X<sub>1</sub> = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
- X<sub>2</sub> = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- X<sub>3</sub> = Kompetensi Sumber Daya Manusia
- X<sub>4</sub>·X<sub>1</sub> = Interaksi antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Komitmen Organisasi
- X<sub>4</sub>·X<sub>2</sub> = Interaksi antara Sistem Intern Pemerintah dengan Komitmen Organisasi
- X<sub>4</sub>·X<sub>3</sub> = Interaksi antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Komitmen Organisasi
- ε = Error term

### 3.5. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala interval. Penelitian ini menggunakan 3 (dua) variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2), Kompetensi Sumber daya manusia (X3), 1 (satu) variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y) dan 1 (satu) Variabel Moderasi yaitu Komitmen Organisasi. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dengan menggunakan skala pengukuran interval.

#### 3.5.1. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No. 71 Tahun 2010).

#### 3.5.2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010).

#### 3.5.3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset ne ara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. (PP No. 60 tahun 2008).

#### 3.5.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan keterampilan, dan sikap perilaku (Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 Tanggal 21 Nopember 2003).

#### 3.5.5. Komitme Organisasi

Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi, dan Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi (Sopiah, 2008).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Deskripsi Data Penelitian

Data dalam penelitian ini merupakan data primer berupa kuesioner. Kuesioner didistribusikan kepada 31 OPD yang menjadi sampel penelitian. Setiap OPD dipilih tiga orang responden untuk mengisi kuesioner penelitian. Pendistribusian kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara diantar langsung oleh peneliti ke setiap instansi yang menjadi sampel penelitian. Kuesioner diberikan kepada Kepala OPD, Bendahara OPD dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) sebagai pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan selama dua minggu atau sepuluh hari kerja pada tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020.

Berdasarkan jumlah, kuesioner yang didistribusikan adalah 93 kuesioner atau 31 OPD yang menjadi sampel penelitian. Terdapat beberapa OPD yang tidak mengembalikan kuesioner. Dengan demikian Jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 77 kuesioner atau sebesar 82,80 % kuesioner yang kembali.

#### 4.1.1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 245 data observasi yang berasal dari perkalian antara periode penelitian (5 tahun; dari tahun 2013 sampai 2017) dengan jumlah perusahaan sampel (49 perusahaan). Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

**Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif**

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
X1	77	62	133	101.22	16.415
X2	77	49	110	87.21	14.615
X3	77	41	100	75.32	14.918
Y1	77	16	40	31.47	5.529

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS (2020)

Pada variabel penerapan SAP diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 62 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 133 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban penerapan SAP adalah 101,22 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memahami dan mengerti bagaimana penerapan SAP dalam pengelolaan keuangan di OPD masing-masing.

Pada variabel SPIP diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 49 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 110 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban SPIP adalah 87,21 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memahami dan mengerti bagaimana pelaksanaan SPIP dengan cukup baik.

Pada variabel kompetensi SDM diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 41 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 100 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban kompetensi SDM adalah 75,32 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden cukup memiliki kualitas kompetensi SDM yang baik terkait dalam pengelolaan keuangan OPD masing-masing.

Pada variabel komitmen organisasi diketahui skor terendah dari jawaban responden yaitu 16 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 40 sehingga rata-rata (mean) total jumlah skor jawaban responden atas komitmen organisasi adalah 31,47 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki komitmen organisasi yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk variabel kualitas laporan keuangan memiliki skor terendah dari jawaban responden yaitu 34 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 80 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban kualitas laporan keuangan adalah 63,43 hal ini berarti bahwa rata-rata responden telah memahami pentingnya laporan keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

#### 4.1.2. Uji Asumsi Klasik

##### a). Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data kontinu berdistribusi normal atau tidak. Sehingga apabila data kontinu telah berdistribusi normal maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya yakni uji validitas, uji-t, korelasi dan regresi dapat dilaksanakan.

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas**

		Standardized Residual
N		77
Normal Parameters <sup>ab</sup>	Mean	.0000000
	Std. Dev	7.06456636
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.059
	Negative	-.065
Kolmogorov-smirnov Z		.570
Asymp. Sig. (2-tailed)		.902

S Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS (2020)

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui nilai *asyp.sig* sebesar 0,902 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

##### b). Uji Multikolinearitas

Asumsi ini menyatakan bahwa antara variabel independen tidak terdapat gejala korelasi. Menurut Ghozali (2011) pengujian Multikolinieritas menggunakan Variance Inflationfactor (VIF) dengan kriteria jika  $VIF > 10$ , maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya, sedangkan jika  $VIF < 10$  maka variabel bebas tidak mempunyai persoalan multikolinieritas.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

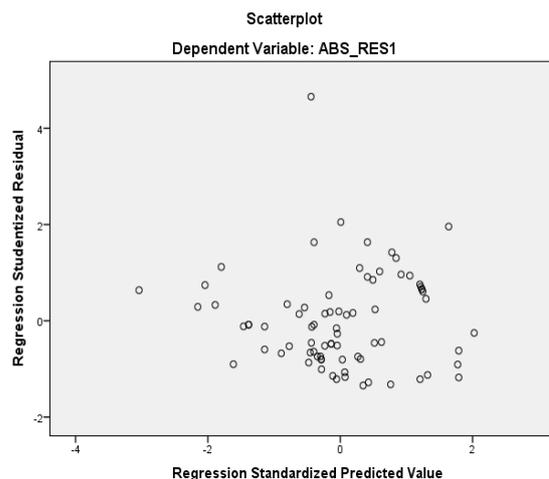
Model	Tolerance	VIF
1		
(Constant)		
X1	.369	2.709
X2	.302	3.311
X3	.608	1.645

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS (2020)

Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai *tolerance* di atas 0,10 dan nilai *VIF* di bawah nilai 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas.

##### c). Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan Glejser Test. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya  $sig > 0,05$  atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2013)



Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS (2020)

**Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Dari hasil uji menunjukkan data berada diatas atau dibawah dari 0 dan data lebih cenderung menyebar dan tidak membentuk pola - pola

tertentu maka dapat disimpulkan pada peeltian ini tidak terjadi heteroskedasititas.

4.1.3. Uji Regresi

**Tabel 4. Hasil Uji Regresi Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	4.730		
	X1	.218	0.82	.318	2.672	.009
	X2	.238	.101	.308	2.351	.021
	X3	.211	.070	.278	3.014	.004

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS(2020)

Dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 4,73 yang berarti bahwa apabila penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia diasumsikan 0 maka kualitas laporan keuangan secara konstan bernilai 4,73.
2. Koefisien regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,218 dengan arti penambahan satu satuan penerapan standar akuntansi pemerintah akan menaikkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,218 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,238 dengan arti penambahan satu satuan penerapan standar akuntansi pemerintah akan menaikkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,238 dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien regresi variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,211 dengan arti penambahan satu satuan penerapan standar akuntansi pemerintah akan menaikkan kualitas laporan keuangan sebesar 0,211 dengan asumsi variabel lain tetap.

4.1.4. Uji Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia menjelaskan variabel Kualitas Laporan Keuangan. Hasil olahan menggunakan aplikasi SPSS dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5. Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.789	.622	.607	7.092

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

4.1.5. Uji Hipotesis

a). Uji F

Pengujian statistik f dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

**Tabel 6. Uji F**

Model				
1	Reg	6053.666	3	2017.889
	Resi	3671.192	73	50.29
	Total	9724.857	76	

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah ditunjukkan oleh nilai adjusted r square sebesar 0,607. artinya, 60,7% kualitas laporan keuangan pemerintah dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia. Dan sisa 39,3 % dipengaruhi oleh variabel selain penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia atau faktor – faktor lain di luar model penelitian ini seperti variabel *good governance* (Zeyn 2011), dan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah (Abdullah 2017).

b). Uji t

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.

Hasil uji statistik t untuk melihat pengaruh antara penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan tabel 4 dengan kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikan sebesar  $\alpha = 0,05$  (5%) dengan nilai t tabel sebesar 1,99 maka pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah menunjukkan derajat signifikan sebesar 0,009 lebih dari kecil  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima sehingga variabel penerapan standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dapat disimpulkan  $H_2$  diterima.

Variabel sistem pengendalian intern pemerintah menunjukkan derajat signifikan sebesar 0,021 lebih dari kecil  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima sehingga variabel sistem pengendalian

intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dapat disimpulkan H3 diterima.

Variabel kompetensi sumber daya manusia menunjukkan derajat signifikan 0,004 lebih dari kecil  $\alpha = 0,05$  maka  $H_0$  diterima sehingga variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dapat disimpulkan H4 diterima.

c). Uji Variabel Moderasi

Pada uji statistik peneliti menguji variabel moderating yaitu komitmen organisasi apakah dapat memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Pada uji ini penelitian menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan uji interaksi.

Persamaan 1:

$$Y_1 = a + \beta_1 X_1 + \beta_4 X_4 + \beta_5 (X_1 \cdot X_4) + \varepsilon$$

**Tabel 7. MRA PSAP**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std.error	Beta		
Cost	19.765	7.232		2.733	.008
PSAP	.020	.088	.030	.231	.818
KO	.911	.246	.445	3.698	.000
PSAP*KO	.004	.002	.399	2.460	.016

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan tabel 7 uji statistik diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,460 koefisien regresi (beta) 0,004 dengan probabilitas (p) = 0,016. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p)  $\leq 0,05$  dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dapat diartikan H5 diterima.

Persamaan 2:

$$Y_2 = a + \beta_2 X_2 + \beta_4 X_4 + \beta_6 (X_2 \cdot X_4) + \varepsilon$$

**Tabel 8. MRA SPIP**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std.error	Beta		
Cost	18.852	6.116		3.082	.003
SPIP	-.009	.188	-.012	-.076	.940
KO	1.149	.321	.561	3.583	.001
SPIP*KO	.003	.001	.296	2.122	.037

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan tabel 8 uji statistik, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,122 koefisien regresi (beta) 0,004

dengan probabilitas (p) = 0,037. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p)  $\leq 0,05$  dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi mampu memoderasi sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dapat diartikan H6 diterima.

Persamaan 3:

$$Y_3 = a + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_7 (X_3 \cdot X_4) + \varepsilon$$

**Tabel 9. MRA KSDM**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std.error	Beta		
Cost	10.670	6.841		1.560	.123
KSDM	.116	.110	.153	1.050	.297
KO	1.281	.230	.626	5.578	.000
KSDM*KO	.002	.003	.107	.574	.568

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS

Berdasarkan tabel 9 uji statistik, diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,574 koefisien regresi (beta) 0,002 dengan probabilitas (p) = 0,568. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p)  $\geq 0,05$  dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi komitmen sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dapat diartikan H7 ditolak.

**4.2. Pembahasan**

4.2.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistik yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan terbukti melalui uji hipotesis. Dengan kata lain bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 60,7% yang artinya 60,7% kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia dengan kata lain semakin tinggi penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dilakukan oleh (Harleni, 2016) dan (Manullang, 2016) dengan menambahkan peraturan perundang-undangan pada variabel independent menghasilkan hasil positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

#### 4.2.2. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistik menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki tingkat signifikan 0,009 lebih dari kecil  $\alpha = 0,05$  dan dengan nilai t hitung sebesar 2,672 lebih besar dari t tabel 1,99 serta koefisien regresi bernilai positif yang artinya penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik selalu diiringi dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Pada variabel penerapan SAP diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 62 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 133 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban penerapan SAP adalah 101,22 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memahami dan mengerti bagaimana penerapan SAP dalam pengelolaan keuangan di OPD masing-masing.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adhi & Suhardjo, 2013) dan (Susilawati & Riana, 2014) yang mana penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Bandung.

#### 4.2.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistik menunjukkan pengendalian intern pemerintah memiliki tingkat signifikan 0,021 lebih dari kecil  $\alpha = 0,05$  dan dengan nilai t hitung sebesar 2,351 lebih besar dari t tabel 1,99 serta koefisien regresi bernilai positif maka  $H_0$  diterima sehingga variabel sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pada variabel SPIP diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 49 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 110 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban SPIP adalah 87,21 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memahami dan mengerti bagaimana pelaksanaan SPIP dengan cukup baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Manullang, 2016) dan (Widyarningsih et al., 2011) variabel pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

#### 4.2.4. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pada hasil uji statistik variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki tingkat signifikan 0,004 lebih dari kecil  $\alpha = 0,05$  dan dengan nilai t hitung sebesar 3,014 lebih besar dari t tabel 1,99 serta koefisien regresi bernilai positif maka  $H_0$  diterima sehingga variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pada variabel kompetensi SDM diketahui total skor terendah dari jawaban responden adalah 41 dan skor tertinggi dari jawaban responden adalah 100 sehingga rata-rata (mean) jumlah skor jawaban Kompetensi SDM adalah

75,32 hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden cukup memiliki kualitas kompetensi SDM yang baik terkait dalam pengelolaan keuangan OPD masing-masing.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harleni, 2016) dan (Manullang, 2016) pada Kota Tebing Tinggi yang mana variabel SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### 4.2.5. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dengan Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistik pada tabel 4 8 diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,460 koefisien regresi (beta) 0,004 dengan probabilitas (p) = 0,016. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p)  $\leq 0,05$  dapat disimpulkan bahwa adanya interaksi antara komitmen organisasi dengan penerapan standar akuntansi pemerintah, artinya komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Sejak tahun 2017 pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus berbenah memperbaiki saran dan temuan yang di berikan oleh BPKP Provinsi Jambi dalam pengelolaan laporan keuangan. Faktor ini lah yang menjadikan penerapan standar akuntansi pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat baik dan terbukti di tahun 2018 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pertama kalinya.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Zeny, 2011) dan (Abdullah, 2017) yang mana SDM sebagai variabel moderasi mampu menghubungkan antara pemahaman standar akuntansi pemerintah dengan kualitas laporan keuangan.

#### 4.2.6. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dengan Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistik pada tabel 4 9, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,122 koefisien regresi (beta) 0,004 dengan probabilitas (p) = 0,037. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p)  $\leq 0,05$  dapat disimpulkan adanya interaksi antara komitmen organisasi dengan sistem pengendalian intern pemerintah yang artinya komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil ini di dukung dengan hasil rata-rata responden merespon jawaban kuisioner sebesar 87,21 % yang artinya para responden yang menjadi objek pada penelitian ini sangat mengerti dan sangat paham fungsi dari sistem pengendalian intern dalam lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Manullang, 2016) dan (Goo et al., 2019) yang mana komitmen organisasi mampu memoderasi hubungan sistem pengendalian intern

pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ende.

#### 4.2.7. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dengan Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji statistik pada tabel 4 10, diperoleh nilai t-hitung sebesar 0,574 koefisien regresi (beta) 0,002 dengan probabilitas (p) = 0,568. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p)  $\geq$  0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak adanya interaksi antara komitmen organisasi dengan komitmen sumber daya manusia yang artinya komitmen organisasi tidak mampu memoderasi hubungan antara komitmen sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan objek penelitian yang mejadi responden hanya sebesar 17% responden yang berlatar belakang Sarjana Ekonomi dari 77 responden yang menjadi objek pada penelitian ini.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Goo et al., 2019) dan (Siwambudi et al., 2017) dimana variabel komitmen organisasi tidak terjadi interaksi antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan di Pemerintahan Kabupaten Klungkung.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Hasil Penelitian ini menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Komitmen organisasi sebagai variabel moderasi berhasil memoderasi hubungan penerapan standar akuntansi pemerintah, dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan komitmen organisasi tidak berhasil memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

### 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sebaiknya OPD lebih memperhatikan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern dengan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang benar-benar memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi, sehingga paham terhadap standar dan aturan yang sudah ditetapkan.
2. Perlunya peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Barat terutama pada unsur pengendalian aset yang dimiliki melalui prosedur pengamanan

fisik aset yang efektif dan efisien sehingga aset dapat terjaga dengan baik.

3. Perlunya peningkatan nilai sumber daya manusia tidak hanya pada unsur pengetahuan dan kompetensi saja, namun yang lebih penting pada unsur perilaku. Perilaku aparatur yang sesuai dengan norma-norma yang dituangkan dalam bentuk kode etik yang wajib dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dengan baik sehingga mendukung terlaksananya tugas aparatur itu sendiri.
4. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh variabel – variabel lain seperti pemanfaatan teknologi informasi, efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.
5. Memperbesar jumlah sampel dan melengkapi metode survey dengan wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat mewawancarai beberapa responden dan menemukan adanya perbedaan antara jawaban di kuesioner dan jawaban secara lisan untuk pertanyaan/pernyataan yang sama.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang diharapkan dapat diatasi pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan kuisioner dalam mengumpulkan data penelitian sehingga sangat mungkin menimbulkan kekeliruan dalam pengukurannya karena jawaban dari responden belum tentu dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.
2. Keterbatasan selanjutnya yaitu nilai *R Square* menunjukkan bahwa variabel dependent hanya dapat dijelaskan dengan variabel independen sebesar 60,7% sisanya 39,3% dijelaskan oleh variabel independen lainnya di luar model penelitian ini seperti variabel *good governance* (Zeyn 2011), dan variabel pemahaman standar akuntansi pemerintah (Abdullah 2017).

## DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, M. W. (2017). Pemoderasian Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmiah Peradaban, III No 2*.
- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang, 5 No 3*.
- Bastian, I. (2010). *Audit Sektor Publik* (Ketiga). Salemba Empat.
- Bastian, I. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.

- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Ketujuh). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goo, K. M. G., Mulyadi, J., & Syam, M. A. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Kabupaten Ende. *EKOBISMAN*, 4 NO 2 (ISSN: 2528-4304).
- Harahap, S. S. (2015). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Harleni. (2016). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur*. Pascasarjana Universitas Jambi.
- Junaidi. (2015). *Ekonometrika I Dengan Program Eviews*. Badan Penerbit Universitas Jambi.
- Manullang, O. E. (2016). *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating*. Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods For Business*. In *Research Methods For Business* (Keempat). Salemba Empat.
- Siwambudi, I. G. N., Yasa, G. W., & Badera, I. D. N. (2017). Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 385–416.
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasi*. Andi Offset.
- Susilawati, & Riana, D. S. (2014). Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Antecedent Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *STIE STEBI Bandung, XI NO.1*.
- Wibowo. (2007). *Manajemen Kinerja*. PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Widyaningsih, A., Triantoro, A., & Wiyantoro, L. S. (2011). Hubungan Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening. *SNA XIV Banda Aceh*.
- www.tanjabbarkab.go.id. (2016). *No Title*.
- www.tanjabbarkab.go.id. (2018). *No Title*.
- Zeny, E. (2011). Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen